

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan objek yang dijadikan pemerintah dalam usaha pembangunan yang sebesar-besarnya dalam memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat diwilayah sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dilakukannya pemberdayaan masyarakat desa, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Aktivitas dalam kegiatan pemerintahan di desa ini juga tidak terlepas dari kehidupan politik yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Perlu dipahami bahwa kehidupan politik dikaji dari sosiologi politik menurut Damsar

(2012:12) “pada dasarnya mengkaji masyarakat yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan politik. Hubungan dilihat dalam sisi saling pengaruh memengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan politik seperti apa saja yang boleh dipolitikkan, bagaimana melakukannya, dan dimana politik boleh dilakukan. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari norma, etika, adat dan hukum yang berkembang di masyarakat”.

Berdasarkan pengamatan penulis dapat dikatakan bahwa masyarakat desa merupakan sistem yang sangat mempengaruhi pemerintahan baik ditingkat daerah maupun nasional. Karena mereka adalah sumber dari pemenuhan pokok bagi kebutuhan hidupnya politik dalam suatu negara dan juga sebagai pondasi untuk mempertahankan kearifan budaya lokal. Kondisi ini tentunya mempengaruhi perilaku politik masyarakat desa.

Salah satu perilaku politik masyarakat desa ialah partisipasi politik. Dalam negara demokrasi partisipasi politik ini merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Selain fakta di atas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bawono (2008:8) dinyatakan bahwa “partisipasi politik masyarakat pemilih pada penyelenggaraan pemilu rendah. Mereka pada umumnya tidak terlibat, netral dan cenderung pasif, lebih mengutamakan bekerja mencari nafkah, sebagai simpatisan dan pengurus partai”.

Rendahnya keikutsertaan masyarakat desa dalam politik semakin diperparah oleh keadaan politik yang tidak stabil, pemberitaan media massa yang menyebabkan masyarakat semakin pesimis, karena para pemimpin yang mereka pilih justru tidak memenuhi janji-janji politik mereka.

Yang sangat dikhawatirkan adalah partisipasi masyarakat yang didasarkan pada uang atau dikenal dengan mobilisasi politik saat dilakukannya pemilihan umum. Biasanya dilakukan oleh aktor-aktor politik ketika masa kampanye untuk bisa lolos menjadi tokoh pemerintahan di daerahnya. Mereka cenderung untuk mencari tokoh adat atau orang yang mampu mengalihkan pemikiran masyarakat untuk ikut mendukung salah satu kandidat dari satu partai.

Dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan di atas, dapat dikatakan bahwa ada masalah dalam proses politik masyarakat desa. Menurut Mahadi (2011:8) masalah ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya munculnya paham pragmatisme. Pragmatisme sering muncul pada masyarakat plural, yakni keanekaragaman yang jamak terjadi di Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika. Dalam masyarakat yang plural inilah pragmatisme tumbuh berkembang, sebab dalam masyarakat seperti ini, idealisme yang kolot atau terjerumus dalam perdebatan hanya akan menghambat tercapainya komitmen dan kepentingan

umum. Pragmatisme politik adalah ciri khas kultur politik dalam masyarakat yang berprinsip ‘yang penting sesuatu/program berfungsi, tak peduli caranya.’ Singkat kata, pragmatisme adalah penolakan terhadap teori dan ideologi, dan lebih memilih fakta dan realitas yang telah teruji.

Pemahaman politik masyarakat yang rendah disebabkan kurangnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Padahal partai politik merupakan ujung tombak dari pembekalan awal tentang hakikat politik kepada masyarakat. Politik yang cenderung mereka tampilkan adalah politik praktis; dimana mereka menjadikan partai hanya sebagai sarana untuk memperoleh jabatan dipemerintahan.

Pada penelitian ini faktor penyebabnya difokuskan kepada rendahnya pemahaman masyarakat desa. Sebab selama ini peningkatan pemahaman masyarakat desa hanya sebatas kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dibidang pertanian dan pengembangan keterampilan bagi wanita, dan akhirnya hanya menyampaikan produk-produk pertanian yang diharapkan mereka mau membeli serta menggunakannya. Sedangkan untuk peningkatan pengetahuan politik sangat minim bahkan tidak ada. Sehingga masyarakat desa tidak memahami pada dasarnya mereka termasuk dalam sistem politik yang sangat mempengaruhi segala aktivitas di pemerintahan.

Pemahaman masyarakat desa tentang politik hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik ketika pemilihan umum dan politik hanya dilaksanakan oleh para pemimpin pemerintahan (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Masyarakat hanya berpikir tentang pemenuhan

kebutuhan untuk diri dan keluarganya. Mayoritas masyarakat desa beranggapan bahwa politik itu kejam. Pemikiran tersebut juga dipengaruhi dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang sampai di wilayah pedesaan.

Televisi yang dapat dikatakan sebagai referensi utama bagi masyarakat desa, selalu mendapatkan berita tentang pelanggaran para pemimpin pemerintahan seperti kasus-kasus korupsi, perdebatan antar pemimpin yang tidak beretika, dan para pemimpin yang tertidur ketika melakukan rapat sidang, dan lain-lain. Membuat masyarakat menjadi enggan untuk mengetahui tentang politik.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang **korelasi pemahaman politik masyarakat desa dan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik; studi kasus di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, kabupaten Simalungun**. Dengan demikian kita dapat mengetahui hubungan antara pemahaman yang dimiliki seorang individu tentang politik dengan kepeduliannya dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

B. Identifikasi Masalah

Pada uraian sebelumnya penulis telah memaparkan hal-hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian. Untuk itu ada beberapa masalah yang diidentifikasi, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik
2. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik rendah
3. Kurangnya pendidikan politik pada masyarakat desa

4. Keikutsertaan masyarakat desa dalam politik masih rendah terlihat dari banyaknya masyarakat yang golput.
5. Adanya mobilisasi politik ketika pemilu sehingga masyarakat menganggap politik hanyalah permainan untuk mendapatkan jabatan
6. Berita tentang aktor politik dari televisi yang selalu melanggar etika politik dan undang-undang.
7. Terdapat korelasi antara pemahaman politik masyarakat desa dan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik
8. Partisipasi politik wujud dari kedaulatan rakyat

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka yang menjadi pembatasan masalah dari penelitian ini adalah: terdapat korelasi antara pemahaman politik masyarakat desa dan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik.

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat korelasi antara pemahaman politik masyarakat desa dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara pemahaman politik masyarakat desa dengan keikutsertaan masyarakat dalam dalam proses politik

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmiah didalam studi ilmu politik
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang tingkat pemahaman masyarakat desa terkait dengan politik.
3. Memberikan inspirasi bahwa kita wajib menjunjung tinggi etika berpolitik khususnya bagi para aktor politik.
4. Mengetahui cara alternatif dalam meningkatkan kesadaran berpolitik bagi masyarakat.
5. Memberikan motivasi bagi pembaca untuk terus mengembangkan pemahaman politik yang benar kepada masyarakat desa yang berada di pelosok.
6. Secara akademis bermanfaat untuk diajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi S-1 di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.